

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara perlu melakukan kerja sama dengan negara lain atau memerlukan kerja sama ekonomi internasional. Oleh sebab itu, setiap negara perlu menjaga hubungan dengan negara lain. Hubungan kerja sama antar negara ini sangat diperlukan dalam tata pergaulan internasional. Kerja sama internasional ini merupakan sebuah kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri merupakan sebuah strategi atau tindakan yang dibuat dengan tujuan nasional yang spesifik, contohnya seperti kebijakan dalam memenuhi kebutuhan negaranya.

Dalam bidang ekonomi, peran negara sangat diperlukan. Adanya perkembangan globalisasi membuat banyak perubahan, salah satunya di dalam sektor perekonomian. Dalam sektor perekonomian ini khususnya dalam bidang perdagangan mendorong negara-negara untuk melakukan praktik perdagangan khususnya perdagangan internasional. Hal ini dapat dikatakan sebagai kerja sama bilateral. Kerja sama bilateral bertujuan untuk menjalin kerja sama di berbagai bidang salah satunya adalah perekonomian (Fajri, 2022).

Negara Korea Selatan merupakan salah satu negara yang disebut sebagai keajaiban ekonomi yang terletak di Kawasan Asia. Korea Selatan berhasil menjadi negara dengan industri modern dalam waktu yang singkat. Negara tersebut memiliki kekuatan perekonomian yang diperhitungkan oleh dunia. Keberhasilan pembangunan negara Korea Selatan ini menjadi model yang

ingin ditiru oleh negara-negara lainnya. Keberhasilan ekonomi Korea Selatan tidak terlepas dari beberapa peran penting di dalamnya (Darini, 2010).

Korea Selatan berusaha memaksimalkan peningkatan perekonomian mereka setelah konflik dan keterpurukannya. Menurut Indonesia kebangkitan perekonomian yang telah dilakukan oleh Korea Selatan ini perlu untuk dijadikan acuan. Sementara itu, adanya *gap* di dalam perekonomian antara Indonesia dan Korea Selatan akhirnya membuat negara Indonesia ingin mengikuti model perekonomian dari Korea Selatan. Dengan adanya kerja sama di dalam bidang industri ini diharapkan nantinya dapat mendorong perekonomian yang saling menguntungkan bagi negara Indonesia dan juga negara Korea Selatan.

Pembangunan perekonomian negara Korea Selatan mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perekonomian Korea Selatan mengalami kemajuan yang didukung dari berbagai sektor industri. Banyaknya industri Korea Selatan yang menguasai pasar global seperti, industri peralatan, industri elektronik, industri telekomunikasi, industri otomotif, serta industri lainnya. Termasuk dengan adanya *Korean Wave* memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian negara Korea Selatan.

Negara Korea Selatan diketahui sebagai negara kapitalis dimana segala aktivitas dikendalikan penuh oleh swasta atau kalangan konglomerat (*chaebol*). Korea Selatan melakukan strategi dalam mencari keuntungan dari berbagai komoditas. Salah satunya ialah dengan hadirnya *Korean Wave*, dimana *Korean Wave* ini menjadi strategi yang sangat diandalkan oleh negara dengan sebutan negara Ginseng tersebut.

Globalisasi sangat berperan penting dalam perubahan yang sangat signifikan. *Korean Wave* sangat diminati para masyarakat diseluruh dunia termasuk di Indonesia. *Korean Wave* mengacu ke berbagai aspek dalam budaya Korea Selatan, meliputi drama, film, gaya busana, kosmetik, gaya rambut, dan tentunya yang sangat digandrungi oleh seluruh remaja pada saat ini ialah musik seperti *boyband*, *girlband*, *band*, atau pun *soloist* (Lidyana, 2020).

Dengan adanya globalisasi dalam *Korean Wave* memberikan dampak perekonomian yang tinggi. Strategi yang dilakukan Korea Selatan untuk menarik perhatian para penggemar K-Drama atau K-Pop ini dengan memasukan 'K' disetiap branding produk mereka. Diketahui bahwa pendapatan Korea Selatan pada tahun 2019 mencapai 52,5 miliar KRW atau sebesar 45,6 juta USD dalam bidang K-Pop saja (Uly, 2020). Dalam proses ekspor perekonomian Korea Selatan meningkat hingga 54,2 miliar USD. Pendapatan per kapita Korea Selatan pada tahun 2019 mencapai 32.225 miliar USD. Perekonomian Korea Selatan terus berkembang dengan pesat, produk domestik bruto (GDP) meningkat pada tahun 2019 mencapai 1,64 triliun USD (Korean Center, 2019).

Selain dengan adanya *Korean Wave* yang menjadi suatu fenomena global terbesar, Korea Selatan juga unggul dalam perkembangan industri elektronik. Produk elektronik milik Korea Selatan diketahui merupakan salah satu perusahaan terbesar di dunia. Perusahaan Samsung merupakan perusahaan yang unggul dan memiliki beberapa sub-perusahaan. *Samsung Electronics* merupakan perusahaan elektronik multinasional dengan 80 pabrik perakitan dan

jaringan penjualan diberbagai negara serta berkontribusi sebanyak 48,8% dalam pendapatan perusahaan Samsung (Kusumo, 2020).

Samsung Heavy Industries merupakan perusahaan yang bergerak di industri pembuatan serta distribusi kapal seperti kapal tanker, kapal kontainer, peralatan penanganan material, dan kapal bor. *Samsung Commercial Vehicle* yang bergerak di industri otomotif. Samsung juga memiliki perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan bernama *Samsung Medical Centre* dan *Samsung Life Insurance* di bidang asuransi. Keterlibatan Samsung di berbagai industri membuat perusahaan ini memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan perekonomian, politik, serta budaya Korea Selatan. Namun, sub-perusahaan yang memiliki dampak paling besar ialah *Samsung Electronics* karena inovasi yang dilakukan setiap tahun karena persaingan pasar *Smartphone*.

Industri otomotif Korea Selatan dikuasai oleh perusahaan Hyundai. Hyundai dikenal sebagai perusahaan produsen mobil terbesar di Korea Selatan dan menembus sektor internasional serta memiliki angka penjualan tercepat di dunia. Hyundai mempromosikan citra perusahaan melalui sebuah media global dengan strategi pemasaran menggunakan sponsor atau *event-sponsorship*. *Event-sponsorship* ialah cara perusahaan mempromosikan *brand* dengan sebuah citra positif seperti *Hyundai Motor Company* yang menjadi sponsor resmi *FIFA World Cup 2014*. Hyundai juga memilih BTS sebagai *brand ambassador* untuk mencapai pasar sasaran (Hardiyanto, 2016).

Perusahaan Hyundai juga bergerak di bidang produk logam, stok pertambangan, konstruksi, dan keuangan. *Hyundai Motor Company* merupakan

salah satu perusahaan yang menjadi perusahaan dengan angka penjualan yang meningkat di dunia. Tingginya peminat dari negara lain mengenai produksi mobil *Hyundai Motor Company* ini membuat perusahaan ini memproduksi sebanyak 6,6 juta unit mobil pada tahun 2021 (Bhardwaj, 2022).

Selain perusahaan industri elektronik dan otomotif tersebut, Korea Selatan juga memiliki salah satu perusahaan yang sukses di berbagai industri hiburan. *CJ Entertainment* yang berkontribusi dalam penyebaran budaya K-Pop, *CJ CGV* perusahaan bisnis bioskop multiplex, dan *CJ E&M* yang merupakan perusahaan media massa dan hiburan terbesar Korea Selatan. Sebelumnya, diketahui bahwa *CJ Corporation* ini merupakan sebuah usaha dari Samsung Group, namun pada tahun 1990 *CJ Corporation* memisahkan diri dan menjadi perusahaan independen dan terpisah (Dhaviyanti & Musadieg, 2017). Dengan tingginya peminat dari berbagai negara mengenai sektor perusahaan industri yang dimiliki Korea Selatan menjadikan beberapa hal ini sebagai produk perekonomiannya.

Korea Selatan yang merupakan negara yang telah bangkit atas keterpurukan negaranya sendiri memiliki perekonomian yang ingin ditiru. Perekonomian Korea Selatan sangat maju pada saat ini, Indonesia diketahui sebagai mitra dagang yang sangat strategis dan sangat sesuai dengan kebijakan dari negara tersebut. IK-CEPA akhirnya resmi dibentuk dengan adanya perjanjian yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada tahun 2020. IK-CEPA atau *Korean Comprehensive Economic Partnership Agreement*

merupakan bentuk kerja-sama bilateral yang terjalin antara Indonesia dan Korea Selatan.

Sebenarnya, pembahasan mengenai perjanjian IK-CEPA ini telah dilakukan sejak tahun 2012 dengan 7 tujuan utama, diantaranya ialah, perdagangan barang, ketentuan asal barang, prosedur kepabeanan, fasilitasi perdagangan, pemulihan perdagangan, perdagangan jasa, penanaman modal, kerjasama ekonomi, isu hukum, dan kelembagaan (Hidranto, 2023). Namun, perundingan IK-CEPA yang telah dilakukan tahun 2012 hingga 2014 ini terhenti karena adanya pergantian pemerintahan.

Perundingan IK-CEPA kembali dilakukan pada tahun 2019. Perundingan kembali tahun 2019 ini memiliki 10 kali putaran perundingan. Hasil perundingan tersebut ialah dengan ditanda tangannya perjanjian IK-CEPA pada 18 Desember 2020 di Seoul, Korea Selatan (Kemendag, 2020). Perjanjian antara kedua negara ini akhirnya akan diimplementasikan pada Januari 2023. Dengan adanya IK-CEPA dapat membuka babak baru bagi kemitraan Indonesia dan Korea Selatan. Melalui peningkatan perdagangan barang dan jasa, investasi, serta kerja sama dalam peningkatan kapasitas. Tentu tujuan kedua negara ini ingin bersama-sama mendapatkan manfaat dari perekonomian yang diharapkan.

Adanya perbedaan kondisi perekonomian antara kedua negara ini secara kasar dapat dianalogikan bahwa IK-CEPA dapat menjadi sangat menguntungkan untuk Indonesia. Perekonomian yang sedang berada di tingkat rata-rata ini dapat sangat menguntungkan untuk Indonesia. Korea Selatan sebagai salah satu negara maju memiliki modal investasi dengan teknologi yang

tinggi, tentu Indonesia sebagai negara berkembang sangat membutuhkan hal tersebut.

Sebelumnya, Indonesia dan Korea Selatan pada tahun 2005 telah menjalin hubungan kerja sama dalam AKFTA atau ASEAN-Korea *Free Trade Agreement*. AKFTA merupakan sebuah perjanjian perdagangan internasional yang berisikan tentang sebuah perjanjian internasional terutama yang melibatkan negara-negara di ASEAN saja dan tentunya negara Korea Selatan. Kerjasama AKFTA ini dalam bidang ekonomi yang berusaha untuk memberikan perdagangan yang bebas (*free trade*) untuk memperlancar arus barang seperti kegiatan ekspor-impor dan juga investasi (Kemendag, 2018).

AKFTA akhirnya ditandatangani oleh para kepala negara anggota ASEAN. Namun AKFTA ini dianggap tidak efektif. Karena di dalam perjanjian AKFTA pemerintah tidak dapat ambisius ataupun fokus. Evaluasi perlu dilakukan karena mengingat adanya penurunan investasi yang dilakukan oleh para investor dari ASEAN ke Korea Selatan begitu pula sebaliknya (Setiawan, 2014). Meskipun terjadi pemberhentian perjanjian, hal ini tidak berdampak buruk terhadap hubungan Indonesia dan Korea Selatan. Adapun hal yang tidak dicakup di dalam AKFTA akan ditawarkan di dalam IK-CEPA.

Indonesia dan Korea Selatan telah membangun hubungan diplomatik selama kurang lebih 50 tahun lamanya. Dengan adanya perjanjian atau kerjasama IK-CEPA atau *Korean Comprehensive Economic Partnership Agreement* ini akan menjadi sebuah hadiah yang istimewa bagi keduanya atas lamanya hubungan yang terjalin antara kedua negara tersebut. Perjanjian ini

sangat mengistimewakan akses pasar kedua negara tersebut. Adanya penandatanganan perjanjian ini juga menjadi sebuah komitmen yang kuat. Hal ini dipercaya akan memberikan dampak positif bagi Indonesia dan Korea Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang diatas dapat penulis simpulkan sebuah permasalahan yaitu bagaimana implementasi perjanjian IK-CEPA terhadap Indonesia? Sementara itu yang kita ketahui bahwa kondisi perekonomian di kedua negara ini jauh berbeda. Penulis bertujuan untuk menjelaskan berbagai manfaat bagi Indonesia atas adanya perjanjian IK-CEPA ini.

C. Teori *Economic Interdependence*

Dalam pemikiran teori interdependensi ekonomi ini banyak membahas mengenai perdamaian dunia dalam melakukan aktivitas perekonomian. Adapun dalam pemikiran teori ini ialah adanya faktor penyebab perdamaian. Adanya rasa saling ketergantungan antar negara dalam bidang perekonomian. Tokoh-tokoh seperti, Robert Jackson & Georg Sorensen (1999), Solomon William Polachek (1980), dan Robert O. Keohane & Joseph S. Nye (2012) merupakan tokoh yang tulisannya menyampaikan tentang pengaruh saling ketergantungan ekonomi dalam perdamaian dunia. Keohane dan Nye (2012) menjelaskan tentang kerangka interdependensi dan *power*. Menurutnya hubungan kedua hal ini sangat kompleks dikarenakan adanya saling ketergantungan.

Berdasarkan pendapat Keohane dan Nye (2012), rasa keterikatan dan saling ketergantungan antara negara satu dengan lainnya dalam perekonomian

maka perdamaian akan tercipta di dalamnya. Jika suatu negara telah berada pada kondisi saling ketergantungan maka dengan segala keuntungan dan manfaat yang diperoleh negara akan sangat menghindari perang (Nye, 2012). Teori interdependensi ekonomi merupakan sebuah pencapaian suatu kesepakatan bahwa ketika negara-negara memiliki keterkaitan dan juga saling ketergantungan dalam aspek ekonomi maka sebuah perdamaian dapat tercipta di dalamnya.

Keohane dan Nye (2012) juga menyebutkan interdependensi merupakan sebuah hal yang dipengaruhi dengan adanya hubungan timbal balik antara negara dari berbagai aspek di dalamnya. Adapun aktor yang memengaruhi di dalamnya merupakan aktor yang saling bergantung satu sama lain di bidangnya. Baik di dalam bidang transaksi, investasi, barang, maupun jasa. Koehane dan Nye juga menjelaskan bahwa teori interdependensi ini merupakan salah satu metode yang dapat membangun sebuah perdamaian serta stabilitas aktor-aktor yang terlibat di dalam bidang perekonomian.

Menurut Solomon William Polachek (1980) dalam Jurnal *Conflict and Trade* menjelaskan bahwa perang dianggap dapat menghilangkan potensi manfaat yang diperoleh saat melakukan kerjasama atau ketergantungan ekonomi tersebut. Kemudian jika terjadi perang maka akan menjatuhkan kondisi perekonomian masing-masing negara (Polachek, 1980). Hal ini menjadikan kedua negara tersebut pada akhirnya saling bergantung atau saling membutuhkan satu sama lain. Dalam hal mendapatkan manfaat atau keuntungan

yang besar nantinya kedua negara tersebut harus menghindari timbulnya sebuah konflik atau peperangan dalam aktivitas perekonomiannya.

Negara tentu menghindari pemilihan penyelesaian konflik dengan perang atau konflik dikarenakan terdapat potensi yang besar akan mendapatkan kerugian dari pelaku pasar. Menurut pendapat Erik Gartzke, Quan Li & Charles Boehmer (2001) bahwa seorang pelaku pasar akan meninggalkan suatu negara kapan saja. Hal ini dapat terjadi karena negara yang ditinggalkan tersebut lebih mementingkan politik dari pada keuntungan ekonomi yang didapatkan (Erik Gartzke, Quan Li, 2001).

Adapun pada saat ini beberapa cara dalam mengukur interdependensi dilihat dari perbandingan aktivitas perdagangan dalam hal kegiatan ekspor-impor bilateral sebuah negara dengan total ekspor-impor negara tersebut. Semakin besar angka presentase ekspor- impor bilateral negara dibandingkan dengan total ekspor-impor negara tersebut ke seluruh dunia maka dapat dikatakan telah terjadinya interdependensi ekonomi. Hal ini terjadi karena kedua negara tersebut saling membutuhkan satu sama lain. Kemudian hal ini nantinya akan mendapatkan sebuah manfaat dan juga sebuah keuntungan yang besar (Polachek, 1980).

Ketergantungan ekonomi ini dapat dilihat bahwa aktivitas perdagangan yang sangat intensif serta arus investasi yang cukup massif terjadi. Sebagai salah satu dari akibat interdependensi ekonomi ini maka negara sebagai aktor rasional akan menggunakan sebuah pertimbangan *opportunity cost* (Nye, 2012). Selain itu, konteks globalisasi juga sangat memberikan dampak serta keuntungan

tambahan bagi pemikiran *economic interdependence* ini. Hal ini karena dapat membentuk perilaku sebuah negara yang sangat memprioritaskan aspek ekonominya.

Teori interdependensi ini lahir dari perspektif kaum liberalis yang menyatakan bahwa saling ketergantungan ini timbul karena adanya kerjasama yang dilakukan antar dua negara atau lebih. Pakar Hubungan Internasional, Robert Jackson dan Georg Sorensen mengungkapkan bahwa teori interdependensi artinya suatu negara membutuhkan peran negara lain. Dengan tujuan untuk dapat memenuhi kebutuhan negaranya dengan melakukan suatu hubungan timbal balik (Sorensen, 1999).

Economic interdependence sendiri ialah salah satu kondisi dimana negara memiliki dependensi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dependensi merupakan sebuah keadaan ketergantungan kepada negara atau dibawah pengaruh negara lain. Hubungan antara salah satu penguasa dengan unsur bergantung atau yang dikuasai. Tentu, fokus negara yang berkerja sama ini menyebabkan kedua negara menjadi bergantung satu sama lain dengan menciptakan sebuah rasa perdamaian di dalamnya.

Adapun dua kondisi yang menentukan suatu negara dapat dikatakan bergantung kepada negara adalah sebagai berikut.

1. Terjadinya sebuah perubahan dalam kebijakan finansial suatu negara. Perekonomian negara lain akhirnya terpengaruh. Dapat dikatakan bahwa ada sebuah kaitan dalam sistem perekonomian kedua negara. Dalam penelitian ini

penulis memberikan contoh dari timbulnya sebuah perundingan perjanjian IK-CEPA.

2. Jika terjadi pemutusan hubungan antara kedua negara terjadi maka salah satu negara akan merasakan dampak negatif. Hal ini dapat dikatakan telah terbentuknya rasa ketergantungan antara negara satu sama lain (Dervis, 2012). Penulis memberikan contoh dengan diberhentikannya perundingan IK-CEPA pada tahun 2014 adanya ketidakseimbangan nilai ekspor impor dari permintaan antara Indonesia dan Korea Selatan.

Menurut Kemal Dervis (2012) dalam ekonomi interdependensi memiliki beberapa aspek yang dapat dikatakan sebagai bentuk ketergantungan negara. Dalam penelitian ini, penulis mengambil dua aspek, aspek ketergantungan perdagangan dan aspek ketergantungan modal. Aspek ketergantungan perdagangan di sini dapat dikatakan bahwa perdagangan merupakan sebuah proses dalam menentukan terbentuknya kondisi untuk negara bergantung ke negara lainnya. Negara berdagang antara satu sama lain serta melakukan pemenuhan kebutuhan bersama, dimana satu negara menjual dan satunya membeli. Dampak negara akan bergantung adalah dorongan bagi mereka untuk lebih memprioritaskan sebuah perdamaian di dalam proses jual-beli atau dagang.

Ketergantungan modal, dapat dikatakan karena investasi merupakan salah satu cara negara tersebut untuk mendapatkan modal. Dalam melakukan kegiatan perekonomiannya suatu negara melakukan proses pembangunan atau juga pembelian untuk pertahanan negaranya sendiri. Negara mendorong aktor

independent seperti pebisnis dalam negara untuk mendapatkan sebuah penanaman modal atau investasi dari luar. Meski investasi tersebut mendorong perekonomian negara namun, negara tetap dapat mengalami tantangan untuk menyeimbangkan investasi negara lain dari seberapa besar pengaruh dalam penanaman modal yang diberikan negara investasi (Dervis, 2012). Interdependensi ekonomi ini diukur dari tingkat perdagangan internasional dan juga investasinya.

Interdependensi ini tidak hanya dapat dilihat berdasarkan aspek saling membutuhkan negara-negara saja. Namun, diketahui bahwa negara maju melakukan kegiatan interdependensi tidak selamanya membutuhkan negara lain dan begitu juga sebaliknya. Menurut politik internasional ini interdependensi merupakan hal yang dipengaruhi dengan adanya hubungan timbal balik antar negara dari berbagai aspek.

D. Hipotesa

1. Berdasarkan rumusan masalah bagaimana implemtasi perjanjian IK-CEPA di atas maka penulis menemukan jawaban sementara yaitu bahwa perjanjian yang dilakukan oleh kedua negara dalam IK-CEPA dengan menggunakan teori Ekonomi Interdependensi ini menimbulkan rasa saling ketergantungan. Pemerintah Indonesia dalam perundingan IK-CEPA mewujudkan kepentingan ekonomi khususnya dalam perdagangan, jasa, dan investasi.
2. Perjanjian IK-CEPA menyediakan fasilitas dalam bentuk investasi yang lebih baik dari segi proteksi maupun akses pasar bagi para investor. Perjanjian ini dapat meningkatkan daya saing serta akses pasar,

membebaskan pos tarif (*zero tariff*) bagi barang atau produk yang berasal dari kedua negara, penyediaan lapangan kerja Indonesia dan Korea Selatan, investasi Korea Selatan, serta beberapa kerja sama lainnya.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan analisis terhadap permasalahan yang diangkat, penulis menggunakan beberapa kajian maupun literatur sebagai bahan referensi untuk memperkuat dan mengembangkan penelitian ini. Literatur pertama ialah “*The Impact of IK-CEPA (Indonesia-South Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement) for Indonesia*” oleh Nabila Salsa Bila dan Hasna Wijayati. Literatur ini menjelaskan mengenai bagaimana proses *re-active* perundingan IK-CEPA yang terhenti tahun 2014. Setelah dirundingkan kembali, perjanjian IK-CEPA ini memiliki banyak keuntungan untuk negara Indonesia seperti isi perjanjian yang telah dirundingkan sebelumnya dengan meningkatkan hubungan dagang dan investasi yang lebih komprehensif (Wijayanti, 2022).

Literatur kedua ialah, “*Diplomasi Kpop Sebagai Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan Terhadap Indonesia*” karya Adira, Achbil, Adityamas, Aria Senna. Literatur ini menjelaskan mengenai penerapan *soft power diplomacy* oleh Korea Selatan yang memberikan banyak dampak positif bagi perekonomian. Hadirnya persepsi positif yang telah dibuat oleh Korea Selatan dengan *Korean Wave* ini mendukung penuh terjalinnya kerjasama diberbagai sektor terutama perekonomian. Korea Selatan berhasil menjadi sebuah negara berindustri modern dan memiliki kekuatan perekonomian yang diakui dunia. Literatur ini

tentu menggambarkan potensi kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan (Adira, 2020).

Literatur ketiga adalah, “*The Impact Of South Korea’s New Southern Policy On Indonesia: Economy And Defense Sectors*” karya Auralia Salsabila Tuanda Pasha & Arie Kusuma Paksi. Literatur ini menjelaskan mengenai *New Southern Policy* Korea Selatan dalam mencapai strategi otonomi yang lebih besar. Dalam *New Southern Policy*, Korea Selatan memfokuskan terhadap tiga pilar utama yaitu politik keamanan, perekonomian, dan sosial budaya, *New Southern Policy* ini tujuan utama Korea Selatan ialah Indonesia yang diyakinkan dapat berkolaborasi dan berkontribusi bagi pemulihan perekonomian Indonesia. Korea Selatan percaya bahwa Indonesia merupakan *partner* yang memiliki potensi pemasaran yang besar. Salah satu contohnya dengan ditandatanganinya perjanjian IK-CEPA (Paksi, 2022).

Literatur keempat yang penulis gunakan ialah “*South Korea’s Interest behind the Reactivation of IK-CEPA Negotiations with Indonesia*” karya Ulim Maidatul Cholif & Arie Kusuma Paksi. Literatur ini memuat riset yang menunjukkan apa saja kebijakan oleh negara Korea Selatan dalam mengaktifkan kembali perundingan perjanjian IK-CEPA. Serta dasar kepentingan apa saja yang nantinya akan didapatkan oleh Korea Selatan. Dalam literatur ini menunjukkan bahwa, pada masa kepemimpinan Presiden Moon Jae-In terdapat sebuah fakta mengenai sumber kemajuan ASEAN yang meliputi ekonomi, politik, serta budaya. Dengan adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok, serta perlambatan ekonomi yang dialami China membuat Korea

Selatan mengeksplorasi pasar ASEAN. Literatur ini tentu memberikan penulis sebuah gambaran baru mengenai perjanjian IK-CEPA dari prespektif Korea Selatan (Paksi, 2022).

Literatur terakhir yang penulis gunakan ialah, “*Hubungan Dagang Internasional Indonesia dan Korea Selatan, 2011-2016*” karya Rebeca Pratiwi. Literatur ini memuat mengenai hubungan bilateral Korea Selatan dan Indonesia selama terhentinya perundingan IK-CEPA. Diketahui bahwa adanya penurunan nilai perdagangan antara kedua negara ini karena terdapat penetapan *normal track*, *sensitive list*, serta *highly sensitive lift* dalam perjanjian AKFTA tahun 2006. Adanya penurunan perdagangan internasional Korea Selatan dan Indonesia ini dikarenakan adanya pengaruh perekonomian yang belum sepenuhnya pulih. IK-CEPA hadir sebagai bentuk respon dari penurunan perdagangan tersebut (Rompas, 2019).

F. Metode Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti, dalam menyusun karya tulis ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan cara mengumpulkan data-data dan juga melakukan perbandingan pada beberapa jurnal dan karya ilmiah lain yang sudah ada sebelumnya. Metode kualitatif tersebut merupakan metode yang menekankan sebuah pemahaman suatu masalah dari pada melihat dengan pandangan generalisasi saja (Sodik, 2015).

Kemudian penulis juga menggunakan penelitian kualitatif deskriptif untuk menjabarkan dan mengupas permasalahan yang sedang terjadi. Dengan penelitian kualitatif ini dapat memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan awal. Dalam penelitian kualitatif ini juga tidak hanya terbatas pada pengumpulan data atau informasi dari berbagai sumber saja akan tetapi data yang didapatkan juga dapat dianalisis dengan demikian pembahasan masalah dan analisis data akan menjadi mudah untuk dipahami.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini dilakukan dengan tujuan agar menghindari melebarnya pembahasan. Penulis akan berfokus untuk meninjau mengenai langkah apa saja yang diambil pemerintah Indonesia dalam menandatangani perjanjian IK-CEPA serta apa saja keuntungan yang akan didapatkan oleh Indonesia. Peneliti membatasi waktu penelitian guna membatasi pembahasan yaitu dari tahun 2019-2023. Pada tahun 2019 telah dilakukan reaktivitas perundingan perjanjian IK-CEPA. Tahun 2020 petandatangan perjanjian IK-

CEPA ini. Sedangkan tahun 2021 hingga saat ini masih dilakukan penantian perjanjian antara kedua negara yang akan diimplementasikan pada Januari 2023.

H. Sistematika Penulisan

Penulis membagi menjadi 4 bab yang masing-masing akan dijelaskan secara rinci ke dalam sub bab. Adapun sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut.

- BAB I** : Bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, tinjauan pustaka, jangkauan penelitian, dan sistematika penulisan.
- BAB II** : Bab ini akan membahas mengenai keputusan Indonesia untuk menandatangani perjanjian IK-CEPA setelah terhentinya perundingan pada tahun 2014.
- BAB III** : Bab ini akan membahas mengenai implementasi perekonomian antara Indonesia dan Korea Selatan setelah menandatangani perjanjian IK-CEPA.
- BAB IV** : Bab ini memuat kesimpulan yang berisikan rangkuman terhadap sub bab-sub bab yang telah dijelaskan sebelumnya.